



**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 105 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, perlu disusun Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5358);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357 Tahun 2006 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
21. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 2007 Tentang Tata Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Nomor : PER.17/MEN/VII/2007);
22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
23. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 747);
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 749);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1464 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195) ;

30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 321);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
35. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1186);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
37. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);

39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
41. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha Di Bidang Pertanian dalam rangka Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
43. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
44. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
45. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 712);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 Tahun 2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
49. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
50. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Cara Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
51. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
52. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999 Nomor 25);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 20 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2000 Nomor 25);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001 Nomor 31);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 35);
57. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 67);

58. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
59. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju;
60. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Mamuju Nomor 61 tahun 2016 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mamuju Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Untuk Menandatangani Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mamuju.
5. Perizinan adalah pemberian dokumen izin dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
6. Non Perizinan adalah pemberian dokumen non izin seperti Tanda Daftar, Rekomendasi, Sertifikat, atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
10. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah Izin yang diberikan kepada tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap yang bekerja di wilayah Republik Indonesia.
11. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPTKS adalah Izin yang diberikan kepada lembaga swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja swasta.
12. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta adalah izin yang diberikan kepada pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta.
13. Izin Lokasi adalah Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
14. Izin Lingkungan adalah Izin yang wajib dimiliki setiap orang dengan melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib Amdal atau Ukl-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan / atau kegiatannya.
15. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada perusahaan dalam upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan.
16. Izin Pengelolaan Persampahan adalah izin yang diberikan dalam rangka kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
17. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
18. Izin Praktek Dokter adalah izin yang diberikan kepada dokter yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
19. Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
20. Surat Izin Kerja Apoteker adalah yang selanjutnya disebut SIKTA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.

21. Surat Izin Kerja Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatandi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri.
22. Surat Izin Kerja Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sarana kesehatan.
23. Izin Toko Obat adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan yang menjual obat – obatan bebas dan obat – obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran.
24. Surat Izin Kerja Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografer di sarana pelayanan kesehatan.
25. Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optizen pada fasilitas pelayanan kesehatan.
26. Izin Apotek adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotik di suatu tempat tertentu.
27. Surat Izin Kerja Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
28. Izin Praktek Pengobat Tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti, dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
29. Surat Izin Praktek Apoteker, yang selanjutnya disebut SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
30. Izin Pendirian Optik adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemilik optik untuk menyelenggarakan pelayanan refraksi, optisi, dan / atau pelayanan lensa kontak.
31. Izin Praktek Fisioterafis adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan / atau pada fasilitas pelayanan kesehatan.
32. Izin Pendirian Balai Pengobatan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan hukum untuk mendirikan balai pengobatan.
33. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin.
34. Izin Analisis Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Analisis yang telah diregistrasi.
35. Izin Pendirian Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
36. Izin Praktek Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktek mandiri.

37. Surat Izin Klinik adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum bidang sarana kesehatan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan, penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor – faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
38. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Asisten Apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian.
39. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (Analis) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Ahli Teknologi Laboratorium (Analis) yang telah diregistrasi.
40. Izin Praktek Gizi adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek pelayanan gizi secara mandiri.
41. Izin Praktek Kesehatan Lingkungan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Izin Praktek Promosi Kesehatan adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan di bidang promosi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
43. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan adalah izin yang diberikan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
44. Izin Pengumpulan Sumbangan adalah izin yang diberikan kepada organisasi untuk melakukan pengumpulan sumbangan.
45. Izin Usaha Hotel dan Penginapan adalah izin yang diberikan kepada perseorangan, badan usaha untuk dapat menyelenggarakan usaha hotel dan penginapan atau penyediaan akomodasi.
46. Izin Usaha Rumah Makan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyediaan makanan dan minuman.
47. Izin Usaha Pelayanan SPA adalah izin yang diberikan untuk mendirikan usaha SPA.
48. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara klinik kecantikan dan salon setelah memenuhi persyaratan tertentu.
49. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah adalah izin yang diberikan jika ingin membawa benda cagar budaya ke luar daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan / atau pameran.
50. Izin Penyelenggaraan Pendidikan adalah izin penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal.
51. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
52. Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara parkir yang memiliki fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan / atau gedung parkir.
53. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi) adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

54. Izin Usaha Angkutan Laut adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha angkutan laut di wilayah perairan Indonesia.
55. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat adalah izin usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.
56. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan sungai dan danau yang melakukan kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang.
57. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara angkutan penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
58. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal adalah Izin yang diberikan untuk usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal yang dilaksanakan di kapal dalam kondisi mengapung.
59. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan adalah izin yang diberikan untuk pembangunan dan pengoperasian pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang.
60. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau adalah izin yang diberikan untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
61. Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan adalah izin usaha yang diberikan kepada pelabuhan pengumpul lokal.
62. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpan Lokal adalah izin yang diberikan untuk pengembangan pelabuhan pengumpan lokal.
63. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal adalah izin yang diberikan untuk operasional pelabuhan yang fungsinya pokoknya melayani kegiatan alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan / atau barang.
64. Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan pengerukan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan.
65. Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan adalah izin yang diberikan untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di perairan.
66. Izin Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam.

67. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan adalah izin yang diberikan menggunakan arsip yang bersifat tertutup.
68. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan budidaya untuk melakukan usaha perikanan budidaya dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
69. Izin Usaha Peternakan adalah izin usaha tertulis yang diberikan untuk memberikan hak melaksanakan peternakan dan melakukan kegiatan produksi.
70. Izin Usaha Pemotongan Hewan / Ternak adalah izin usaha tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha pemotongan hewan.
71. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi adalah izin untuk melakukan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
72. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan seperti : pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
73. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
74. Izin Usaha Toko Swalayan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan usaha pengelolaan toko swalayan atau toko modern, seperti Minimarket, Supermarket, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
75. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disebut IUI adalah izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
76. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
77. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
78. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
79. Izin Usaha Pertanian adalah izin usaha di bidang pertanian
80. Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan menghasilkan benih dan / atau bibit yang dapat berupa sel telur, telur tertunas dan embrio ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
81. Izin Usaha Pengecer adalah pernyataan tertulis yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan / atau pengeluaran obat hewan.

82. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gedung tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
83. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disebut TDI adalah tanda daftar yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri dan diberlakukan sebagai IUI dengan nilai investasi sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan.
84. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan pariwisata yang telah disahkan pendaftarannya.
85. Rekomendasi Kegiatan adalah surat yang diterbitkan yang diberikan kepada pelaksana kegiatan yang meliputi : Car Free Day, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan / atau Busana, Kontes Kecantikan, dan sejenisnya, Pameran, Pasar Malam, Komedi Putar dan sejenisnya, Pertandingan Olah Raga, dan lain – lain.
87. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum adalah surat yang diterbitkan untuk digunakan meminjam fasilitas umum milik Pemerintah Daerah, meliputi : Rumah Adat, Gedung Pemuda, Lapangan Ahmad Kirang, Anjungan Pantai Manakarra, Stadion manakarra.
88. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha perikanan adalah surat yang diterbitkan sebagai kelayakan dari penerbitan surat izin usaha perikanan.
89. Rekomendasi Keayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan adalah surat yang diterbitkan sebagai kelayakan dari penerbitan surat izin usaha penangkapan ikan.
90. Surat Keterangan Asal adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.
91. Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga adalah jaminan tertulis yang diberikan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu, dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Bagian Pertama
AZAS

Pasal 2

Asas-asas pelayanan perizinan dan non perizinan terdiri atas :

1. Asas kecepatan dan ketepatan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dituntut agar senantiasa disiplin dalam mengerjakan setiap tahapan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Asas etika, estetika dan keramahan adalah komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang ramah,nyaman,mudah dan transparan yang bermuara pada good governance.
3. Asas transparansi adalah dalam melaksanakan pelayanan harus dapat memberikan informasi yang jelas dan benar, baik yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelayanan maupun waktu penyelesaian serta beban biaya,menuju clean governance.

4. Asas kecermatan dan ketelitian adalah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan maupun non perizinan, harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga setiap layanan perizinan dan non perizinan memenuhi kepatuhan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Asas pertanggungjawaban adalah setiap jenis perizinan dan non perizinan yang diterbitkan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi keabsahan, isi, format, persyaratan, jangka waktu, prosedur, dan mekanismenya.
6. Asas ketertiban adalah dalam menyelenggarakan pelayanan publik, harus memperhatikan tertib pelayanan, pencacatan, pengarsipan, dan pelaporan.

Bagian kedua
TUJUAN
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi pelayanan publik menyangkut persyaratan perizinan dan non perizinan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan memutus mata rantai birokrasi, sehingga dokumen perizinan dan non perizinan tidak lagi menjadi kewajiban masyarakat terhadap pemerintah daerah akan tetapi menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga tercipta rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap kemajuan daerah.

BAB III
JENIS – JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Jenis – Jenis perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

A. Jenis – Jenis Perizinan, yaitu :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - a. IzinMendirikanBangunanReklame;
 - b. DuplikasiIzinMendirikanBangunan;
 - c. PemecahanIzinMendirikanBangunan;
 - d. PerubahanIzinMendirikanBangunan;
 - e. Balik NamaIzinMendirikanBangunan;
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
4. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
5. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
6. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta

7. Izin Lokasi
8. Izin Lingkungan
9. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Izin Pengelolaan Persampahan
11. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)
12. Izin Praktek Dokter
13. Izin Praktek Bidan
14. Surat Izin Kerja Apoteker
15. Surat Izin Kerja Perawat
16. Surat Izin Kerja Perawat Gigi
17. Izin Toko Obat
18. Surat Izin Kerja Radiografer
19. Surat Izin Kerja Refraksionis Optizen
20. Izin Apotek
21. Surat Izin Kerja Bidan
22. Izin Praktek Pengobat Tradisional
23. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
24. Izin Pendirian Optik
25. Izin Praktek Fisioterafis
26. Izin Pendirian Balai Pengobatan
27. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin
28. Izin Analisis Kesehatan
29. Izin Pendirian Rumah Sakit
30. Izin Praktek Perawat
31. Surat Izin Klinik
32. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
33. Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium (Analisis)
34. Izin Praktek Gizi
35. Izin Praktek Kesehatan Lingkungan
36. Izin Praktek Promosi Kesehatan
37. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
38. Izin Pengumpulan Sumbangan
39. Izin Usaha Hotel dan Penginapan
40. Izin Usaha Rumah Makan
41. Izin Usaha Pelayanan SPA
42. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan / Salon
43. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah
44. Izin Penyelenggaraan Pendidikan
45. Izin Trayek
46. Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan
47. Izin Penyelenggaraan Angkutan Kawasan Tertentu (Taksi)
48. Izin Usaha Angkutan Laut
49. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat
50. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
51. Izin Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
52. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal
53. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
54. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
55. Izin Usaha Pengumpul Lokal Di Pelabuhan
56. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pengumpul Lokal

57. Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpul Lokal
58. Izin Pengerukan Perairan Pelabuhan
59. Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan
60. Izin Koperasi Simpan Pinjam
61. Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Yang Di Simpan Di lembaga Kearsipan
62. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
63. Izin Usaha Peternakan
64. Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak
65. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi
66. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
67. Izin Usaha Minuman Beralkohol
68. Izin Usaha Toko Swalayan
69. Izin Usaha Industri (IUI)
70. Izin Budidaya Tanaman Perkebunan
71. Izin Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
72. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara Budidaya dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
73. Izin Usaha Pertanian
74. Izin Usaha Produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan
75. Izin Usaha Pengecer

B. Jenis – Jenis Non Perizinan adalah :

1. Tanda Daftar Gudang (TDG)
2. Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
4. Rekomendasi Kegiatan
5. Rekomendasi Peminjaman Fasilitas Umum
6. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
7. Rekomendasi Kelayakan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
8. Surat Keterangan Asal
9. Sertifikat Produksi Pangan dan Industri Rumah Tangga.

Pasal 5

Jenis Perizinan yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Trayek;
3. Izin Usaha Minuman Beralkohol;
4. Izin Usaha Perikanan Budidaya;
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 6

Persyaratan jenis – jenis perizinan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI MAMUJU

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019 NOMOR 769

Lampiran Peraturan Bupati Mamuju
 Nomor : 105 Tahun 2019
 Tanggal : 1 Oktober 2019

**PERSYARATAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN
 MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN MAMUJU**

A. DINAS PERDAGANGAN	
1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Foto Copy Akta Pendirian atau Perubahan Badan Hukum bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan	
e. Foto copy KTP	
f. Foto copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
g. Surat Keterangan Usaha dari Lurah / Desa	
h. Foto Copy NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak) Badan Usaha Jasa Konstruksi	
i. Foto Copy IMB	
j. Surat Akta Pendirian Badan Usaha dari Notaris (PT,CV dan Badan Usaha Lainnya)	
k. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
l. Rekomendasi BPJS KetenagaKerjaan	
m. Foto Copy Pajak Reklame	
n. Surat Keterangan Tanah, Sertifikat Hak Milik atau Perjanjian Sewa	
o. Foto Copy Izin Usaha	
p. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
q. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
r. Rekomendasi Tim Teknis dari OPD Terkait	
2. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	

d. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
e. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
f. Foto copy KTP	
g. Foto copy Izin Usaha	
h. Surat Pernyataan bersedia menempatkan Produk UMKM dan Kesanggupan melaksanakan CSR	
i. Kajian Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat	
j. Foto copy IMB	
k. Analisis mengenai dampak lingkungan untuk lalu lintas (ANDALALIN)	
l. Surat permohonan Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o. Pas foto 3x4 2 Lembar	
3. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL	
a. Mengisi Formulir Permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Foto Copy Izin Usaha	
g. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Surat Keterangan Penunjukan dari Distributor / sub Distributor sebagai Pengecer / Penjual langsung	
k. Surat Permohonan ditujukan Kepada Bupati Mamuju Cq. Ketua TIM Pengendali dan Pengawasan	
l. Melampirkan Fakta Integritas (Gol. A)	
m. Untuk perpanjangan melampirkan Laporan Penjualan per triwulan	
n. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
p. Pas Foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar	
4. IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	

c. Surat Keterangan dari Lurah / Desa Setempat	
d. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT,CV dan Badan Usaha Lainnya)	
e. Foto Copy KTP	
f. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
g. Foto Copy Izin Usaha	
h. Foto Copy IMB	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Surat Pernyataan kesediaan menerima produk UMKM	
l. Kajian Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat(bagi Swalayan)	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 Lembar	
5. TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy Izin Usaha	
d. Foto Copy IMB	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Foto Copy KTP	
g. Denah Lokasi Gedung Beserta Ukurannya	
h. Foto Copy Surat Perjanjian Pemakaian / Penguasaan Gudang dengan Pemilik Gudang	
i. Surat Pernyataan Pengelolaan Gudang sesuai prosedur	
j. Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN)	
k. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
l. Rekomendasi BPJS Katenagakerjaan	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidaasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	
p. Pas foto Ukuran 3x4 sebanyak 2 Lembar	
6. SURAT KETERANGAN ASAL	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP / Pasport	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib	

Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
f. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
g. Foto Copy Izin Usaha, Izin Usaha Industri	
h. Specimen Tanda Tangan	
i. Struktur Biaya Per Unit	
j. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perdagangan Kab. Mamuju	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)	
n. Angka Pengenal Impor	
a. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	
B. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)	
7. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	
a. Mengisi formulir permohonan,	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Pernyataan Kepemilikan Tanah (bila pemohon dan pemilik tanah berbeda)	
d. Foto Copy KTP	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Foto Copy Sertifikat Hak Milik	
g. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Kemenkumham, Pengadilan (PT, CV atau Badan Usaha Lainnya)	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Advice Planning (Peruntukan Lahan)	
k. Fotocopy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
l. - Gambar Bangunan Site Plan - Gambar situasi / rencana tapak - Gambar Denah Bangunan - Gambat Tampak - Gambar Petongan	
m. Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatangan / pemohon)	
n. Tanda Registrasi dari Dinas Perkimta Kab. Mamuju	
o. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
p. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
q. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sesuai dengan Peruntukan IMB terhadap status pemanfaatan lahan

r. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju	
A. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN REKLAME	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
d. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Sertifikat Hak Milik	
f. Surat perjanjian sewa menyewa dari pemilik Tanah Pemkab Mamuju (bila diperlukan)	
g. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Ruang dan Penataan Ruang	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Foto Copy Pajak Reklame	
k. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Fotocopy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
B. PEMECAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Asli IMB	
f. Fotocopy Sertifikat Hak Milik	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Surat Pernyataan Penyanding di ketahui Lurah/Desa	
j. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju	
C. BALIK NAMA IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	

c. IMB Asli	
d. Fotocopy KTP	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Fotocopy Sertifikat Hak Milik	
g. Surat Pernyataan Penyanding di ketahui Lurah/Desa	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
D. DUPLIKASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy Surat keterangan hilang dari kepolisian	
d. Fotocopy KTP	
e. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Fotocopy Sertifikat Hak Milik	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju	
E. PERUBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy IMB	
f. Fotocopy Sertifikat Hak Milik	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	

i. Surat Pernyataan Penyanding diketahui Lurah / Desa	
j. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Fotocopy Dokumen (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	
8. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak) Badan Usaha Jasa Konstruksi	
f. Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA)	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Daftar Riwayat Hidup Penanggungjawab Badan Usaha	
j. Fotocopy Ijazah Pendidikan Formal, SKA, SKT Tenaga Ahli	
k. Fotocopy Izin Usaha	
l. Rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi (Dinas PUPR)	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o. Pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar	
C. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
9. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 enam) bulan	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak) bagi Pemberi Kerja	
e. Bukti polis Asuransi di perusahaan Asuransi berbadan Hukum Indonesia	
f. Foto copy Bukti kepesertaan ikut program	

jaminan sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Foto copy surat penunjukan TKI pendamping	
j. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kab. Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki TKA dari Instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di Instansi Teknik terkait	
n. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Transnaker Kab. Mamuju	
o. Pas foto Ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar	
10. IZIN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto copy Akta Pendirian atau Perubahan Badan Hukum bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan	
e. Foto copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Foto copy hak kepemilikan tanah bangunan kantor atau perjanjian kontrak /sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan akta notaris	
i. Surat pernyataan dari penanggungjawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggungjawab pada LPTKS lain	
j. Bagan struktur organisasi dan personil	
k. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun kedepan	
l. Foto Copy Ijazah Terakhir Pengelola	
m. Profil Lembaga BPJS Ketenaga Kerjaan	
n. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
p. Bukti wajib lapor ketenaga kerjaan yang masih berlaku dari Disnaker Provinsi	
q. Rekomendasi dari Distransnaker	

Kab. Mamuju	
r. foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar	
11. IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA SWASTA	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Foto Copy tanda bukti pemilikan tempat pelatihan	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Profil Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta	
l. (LPTKS)	
m. Rekomendasi Tim Teknis dari Distransnaker Kab. Mamuju	
D. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
12. IZIN LINGKUNGAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Bukti Formal yang menyatakan kegiatan usaha disetujui secara prinsip	
d. Rekomendasi Peruntukan Lahan dari Dinas PUPR atau dari KPH	
e. Foto Copy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
f. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
g. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
h. Profil Kepemilikan dan Kegiatan Usaha, yang terdiri dari :	
- Akta pendirian usaha	
- Foto copy KTP	
- Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
- Foto copy Asli Sertifikat Hak Milik	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	

j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
s. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sesuai dengan Peruntukan IMB terhadap status pemanfaatan lahan
t. Surat Fakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan	
13. IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto Copy Dokumen (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	
f. Akta pendirian perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
g. Dokumen tempat penyimpanan Limbah B3 - Izin Penyimpan - Izin Pengumpul - Izin Pengangkut	
h. Dokumen Pengemasan Limbah B3	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. File scan Asli Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju	
14. IZIN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto Copy Akta pendirian perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
g. Foto copy Izin Lokasi	
h. Foto Copy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Foto copy Izin Usaha	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir	

yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Mamuju	
E. DINAS KESEHATAN	
15. IZIN APOTEK	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Asli dan Fotocopy Izin surat izin atasan (bagi ASN, TNI dan pegawai instansi pemerintah lainnya)	
f. Fotocopy Ijazah Apoteker / Asisten Apoteker	
g. Denah Bangunan dan lokasi	
h. Foto copy STRA	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Fotocopy SIPA dan SIPTTK	
l. Foto copy Izin Usaha dan IMB	
m. Akta perjanjian kerjasama antara Apoteker pengelola dan Pemilik sarana	
n. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan Nama, Alamat, Tanggal Lulus dan Nomor Izin Praktek	
o. sarana dan prasarana	
p. Surat Pernyataan pemilik dan pemohon sarana tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan di bidang obat	
q. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
r. Fotocopy SITU, SIUP dan IMB	
s. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
t. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
u. Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 3 lembar	
16. IZIN PRAKTEK DOKTER	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Asli STR Dokter yang di terbitkan oleh Konsil kedokteran yang masih berlaku	

e. Fotocopy Surat penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menyelesaikan masa bakti	
f. Fotocopy Ijazah	
g. Foto copy surat Izin praktek yang dimiliki sebelumnya	
h. Surat keterangan sehat dari dokter	
i. Surat pernyataan memiliki tempat praktek/ surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat prakteknya	
j. Denah Lokasi Tempat Praktek	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
n. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
o. Asli Rekomendasi Dari Organisasi Profesi, Sesuai Tempat Praktek	
p. Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
q. Pasfoto (pakaian jas praktik 3 x 4 2 lembar)	
17. IZIN PRAKTEK BIDAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Fotocopy Ijazah Bidanyang dilegalisir	
e. Fotocopy STR yang masih berlaku	
f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Surat keterangan dari kepala puskesmas / dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan	
j. Surat persetujuan atasan bila ada dalam masa pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai negeri pada sarana kesehatan	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Rekomendasi dari organisasi profesi (PROI)	
n. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan	
o. Surat keterangan bekerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan	
p. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	

18. IZIN PRAKTEK PERAWAT	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Fotocopy STR yang masih berlaku	
e. Fotocopy ijazah	
f. Surat keterangan sehat dari dokter	
g. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
h. BuktipembayaranPBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
i. BuktipembayaranBPHTBdalamhalterjadi pengalihan kepemilikan	
j. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPNI)	
k. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
l. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar yang terbaru	
19. IZIN TOKO OBAT	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Izin Usaha dan IMB	
f. STRTTK	
g. Foto copy Surat Tanda Registrasi Asisten Apoteker yang sudah dilegalisir	
h. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis	
i. Fotocopy Surat pernyataan kerjasama antar pemilik toko obat dan penanggung jawab	
j. Foto copy Surat pernyataan pemilik tidak terlibat pelanggaran dibidang obat	
k. Daftar obat yang akan dijual pada toko obat	
l. Daftar sarana dan prasarana	
m. Denah bangunan	
n. BuktipembayaranPBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. pembayaranBPHTBdalamhalterjadi pengalihan kepemilikan	
p. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
q. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar	
20. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER	

a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Foto copy STRA yang dilegasir oleh KFN	
e. Foto copy Ijazah Apoteker	
f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter	
g. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
h. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
i. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
j. Denah lokasi Apotik	
k. Rekomendasi dari organisasi profesi	
l. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
m. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar	
21. SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Fotocopy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Foto copy Ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian	
e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter	
f. Fotocopy STRTTK	
g. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
h. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
i. Rekomendasi dari organisasi profesi (PAFI)	
j. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
k. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar	
22. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM (ANALIS)	
a. Mengisi fomulir permohonan	
b. Foto Copy KTP	
c. Foto Copy Ijazah Profesi	
d. Foto Copy STR	

e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi	
f. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
g. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
h. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
i. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
j. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
23. SURAT IZIN KERJA PERAWAT	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan	
e. Fotocopy Surat izin perawat yang masih berlaku	
f. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memilik SIP	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Rekomendasi dari organisasi profesi	
k. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
24. SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter	
i. Rekomendasi dari organisasi profesi (PPGI)	
j. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	

l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
25. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
e. Fotocopy Ijazah Radiografer yang di sahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan radiografer	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki SIP	
k. Fotocopy STR yang masih berlaku	
n. Rekomendasi dari organisasi profesi	
l. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
m. Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
26. SURAT IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTIZEN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
e. Surat keterangan sehat dari dokter	
f. Fotocopy Ijazah pendidikan refraksionis optizen	
g. Surat STRO yang masih berlaku	
h. Foto Copy Ijazah pendidikan refraksionis optizen	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
l. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
27. IZIN PRAKTEK PENGOBAT TRADISIONAL	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui	

Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Surat keterangan dari Kepala Desa/ Lurah tempat melakukan praktek	
e. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Pengobat Tradisional	
f. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
g. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
h. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
i. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
28. IZIN KLINIK	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto copy Izin Usaha	
f. Akta Pendirian Klinik	
g. Profil Klinik	
h. Bukti kepemilikan sarana (File scan Asli IMB dan Sertifikat Hak Milik)	
i. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
j. Bukti kepemilikan sarana (Fotocopy IMB dan Sertifikat)	
k. Analisis Dampak laluLintas (ANDALALIN)	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. surat pernyataan sebagai dokter penanggungjawab klinik	
o. surat pernyataan tidak terlibat pelanggaran dibidang obat	
p. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar	
29. IZIN PENDIRIAN OPTIK	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Izin Usaha	
f. Bukti kepemilikan sarana (Fotocopy IMB dan Sertifikat)	

g.	Fotocopy Surat Izin Refraksionis Optizen	
h.	Fotocopy Ijazah Pendidikan Refraksionis Optizen	
i.	Daftar alat optikal yang tersedia	
j.	Denah lokasi dan ruangan optik	
k.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
l.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
m.	Rekomendasi dari Organisasi profesi	
n.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
q.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
r.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
s.	surat pernyataan sebagai penanggungjawab optik	
t.	Pas Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar	
30. IZIN PRAKTEK FISIOTERAFIS		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Fotocopy KTP	
c.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d.	Fotocopy ijazah Fisioterafis yang dilegalisir	
e.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
f.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
g.	Rekomendasi dari Organisasi profesi	
h.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
i.	Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	
31. IZIN PENDIRIAN BALAI PENGOBATAN		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Fotocopy KTP	
d.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e.	Foto Copy Akta pendirian perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
f.	Denah lokasi dan rungan	
g.	Fotocopy Izin Usaha	
h.	Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
i.	Daftar tenaga kesehatan dan administrasi	
j.	Fotocopy SIP Dokter	
k.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	

l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Dokumen profil Balai pengobatan	
n. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
o. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	
32. IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH BERSALIN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Izin Usaha	
f. Foto copy IMB	
g. Fotocopy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
h. Daftar Ketenagaan yang dimiliki	
i. Denah Lokasi dan Bangunan	
j. Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN)	
k. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Paspoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
33. IZIN ANALIS KESEHATAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Fotocopy Copy Ijazah Analisis kesehatan	
e. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
f. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
g. Fotocopy STR yang masih berlaku	
h. Surat keterangan sehat dari dokter	
i. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja	
j. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan	
k. Rekomendasi dari organisasi profesi	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Pas Foto ukuran 4 x 6 Latar Merah sebanyak 2 Lembar	
34. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT	

a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan	
f. Fotocopy Izin Usaha	
g. Foto copy IMB	
h. Fotocopy Dokumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL	
i. Struktur organisasi rumah sakit	
j. Dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri dari Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design dan Master Plan	
k. Pemenuhan Pelayanan Alat Kesehatan	
l. Daftar ketenagaan medis, paramedis, non medis	
m. Profil Rumah Sakit	
n. Daftar Inventarsi Medik	
o. Denah dan Bangunan Rumah Sakit	
p. Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN)	
q. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	
r. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
s. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan	
t. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
u. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
v. Fakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan / pemilik perusahaan	
w. surat pernyataan telah melaksanakan sosialisasi keberadaan Rumah Sakit kepada masyarakat	
x. pas foto ukuran 3X4 sebanyak 3 lembar	
35. SURAT IZIN KERJA BIDAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Fotocopy Ijazah bidan yang dilegalisir	
e. Fotocopy STR yang masih berlaku	
f. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter	
g. Surat keterangan dari kepala puskesmas /	

	dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan	
h.	Surat persetujuan atasan bila ada dalam masa pelaksanaan masa bakti atau sebagai pegawai negeri pada sarana kesehatan	
i.	Rekomendasi dari organisasi profesi (PROI)	
j.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan	
k.	Surat keterangan bekerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan	
l.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m.	Buktipembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n.	Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
36. IZIN PRAKTEK GIZI		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Fotocopy KTP	
c.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d.	Fotocopy Ijazah	
e.	Fotocopy STR	
f.	Surat Keterangan Sehat dari Dokter	
g.	Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan tempat praktek	
h.	Rekomendasi dari PERSAGI	
i.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
j.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
k.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar latar warna merah	
37. IZIN PRAKTEK KESEHATAN LINGKUNGAN		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Fotocopy KTP	
c.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d.	Fotocopy Ijazah	
e.	Surat Keterangan Sehat dari Dokter	
f.	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku	
g.	Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan	
h.	Rekomendasi dari Organisasi Profesi	

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Rekomendasi Tim teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju	
l. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar latar warna merah	
38. IZIN PRAKTEK PROMOSI KESEHATAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Fotocopy STR yang masih berlaku	
e. Fotocopy Ijazah	
f. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
g. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
h. Surat Keterangan Sehat dari dokter	
i. Surat Pernyataan memiliki tempat praktek	
j. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas yang bersangkutan	
k. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
l. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar latar warna merah	
39. IZIN PRAKTEK PROMOSI KESEHATAN	
a. Mengisi Formulir Permohonan	
b. Foto copy KTP	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Foto copy STR yang masih berlaku	
e. Foto copy Ijazah	
f. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
g. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan Surat keterangan sehat dari Dokter	
h. Surat pernyataan memiliki tempat praktek	
i. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja pada fasilitas yang bersangkutan	

j. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
k. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar latar warna merah	
40. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP Pemilik / Penanggung Jawab	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto copy Izin Usaha	
f. Surat Keterangan Usaha dari Desa / Lurah diketahui oleh Camat	
g. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan	
h. Peta Lokasi dan Denah bangunan	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Komposisi Produk dan Rancangan Label Pangan	
l. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan Surat keterangan sehat dari Dokter	
41. SURAT IZIN KERJA APOTEKER	
a. Mengisi Formulir permohonan	
b. Foto Copy KTP	
c. Foto Copy NPWP(keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Foto Copy STRA yang dilegalisir oleh KFN	
e. Foto Copy Ijazah Apoteker yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Apoteker	
f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter	
g. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan tempat praktek	
h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PAFI / IAI)	
i. Denah Lokasi Apotek	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	

n.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan Surat keterangan sehat dari Dokter	
o.	Rekomendasi dari organisasi Profesi	
p.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
j.	Pas Foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 lembar	
42. SURAT IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Foto Copy KTP	
c.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d.	Foto Copy STRA yang dilegalisir oleh KFN	
e.	Foto Copy Ijazah Apoteker yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Apoteker	
f.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Tidak Buta Warna	
g.	Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PAFI / IAI)	
h.	Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
q.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
r.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
s.	Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 lembar	
43. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
d.	Fotocopy KTP	
e.	Foto Copy NPWP(keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f.	Fotocopy SITU, SIUP, IMB, IUJK	
g.	Fotocopy Izin Lokasi	
h.	Fotocopy Sertifikat / Kepemilikan Tanah	
i.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m.	Foto Copy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
n.	Analisis Dampak Lalulintas (ANDALALIN)	

o. Site Plan dan jadwal Kegiatan	
p. Pernyataan Kesiapan Memfasilitasi tim teknis	
q. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Mamuju	
r. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 Lembar	
F. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
44. IZIN USAHA RUMAH MAKAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat, /akta jual beli/ sporadik)	
f. Fotocopy Izin Usaha dan IMB	
g. Foto Copy Dokumen (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	
h. Fotocopy Pajak Reklame	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Analisis dampak lalu lintas (ANDALIN)	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Surat pernyataan bersedia menggunakan e-kasir	
o. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Mamuju	
p. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kesehatan Kab.Mamuju	
45. IZIN USAHA HOTEL, PENGINAPAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat, /akta jual beli/ sporadik)	
f. Akta Pendirian Perusahaan	
g. Fotocopy Izin Usaha dan IMB	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Fotocopy Pajak Reklame	

k.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir	
l.	Surat pentataan bersedia menggunakan e-kasir	
m.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o.	Rekomendasi Tim Teknis dari dinas pariwisata kab. mamuju	
46. IZIN USAHA PELAYANAN SPA		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Foto copy KTP	
d.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e.	Foto Copy Izin Usaha	
f.	Foto Copy IMB	
g.	Foto Copy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
h.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Mamuju	
i.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k.	Gambar/ foto rencana usaha	
l.	Surat Pernyataan bersedia menggunakan e-Kasir	
m.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kab. Mamuju	
n.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o.	Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar	
47. IZIN PENYELENGGARAAN KLINIK KECANTIKAN / SALON		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Foto Copy Izin Usaha	
d.	Foto Copy IMB	
e.	Foto Copy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
f.	Daftar tarif dan jenis pelayanan	
g.	Penanggung jawab teknis medis melampirkan : - Surat pengangkatan sebagai penanggung jawab medik - surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab teknis - Foto copy KTP - Foto copy STR Dokter - Foto copy SIP	
h.	Daftar peralatan dan keterangan	
i.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib	

Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
j. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
k. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Mamuju	
l. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
m. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
n. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kab. Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
p. Denah Ruang dan Bangunan	
48. IZIN MEMBAWA CAGAR BUDAYA KELUAR DAERAH	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Denah lokasi cagar budaya	
f. Foto Benda cagar budaya	
g. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
h. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan	
k. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Mamuju	
49. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Profil Perusahaan, meliputi : - Foto Copy KTP - Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak) - Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya) - Foto Copy SITU, SIUP	
d. Foto Copy IMB	
e. Izin Lingkungan	
f. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
g. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	

i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan kab. mamuju	
k. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar	
50. REKOMENDASI KEGIATAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP yang Masih Berlaku	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Profil Perusahaan	
f. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan kab. mamuju	
g. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Mamuju	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
k. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Foto Copy Proposal Kegiatan	
51. REKOMENDASI PEMINJAMAN FASILITAS UMUM	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP yang masih berlaku	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Surat Pengantar dari Kelurahan untuk kegiatan sosial	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Mamuju	
i. Rekomendasi Tim Teknis dari Badan pengelola Keuangan dan Aset daerah Kab. Mamuju	
j. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
k. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Profil Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan	
m. Pas foto Warna 3x4 sebanyak 2 lembar	
G. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	

52. IZIN PENYELENGGARAAN / PENDIRIAN PENDIDIKAN	
a. Mengisi formulir Pemohon	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT,CV dan Badan Usaha Lainnya)	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak) Lembaga	
f. Foto copy Sertifikat Hak Milik	
g. Foto Copy IMB	
h. Foto Copy Rekening Lembaga	
i. Surat Keterangan dari Koordinator Kecamatan (KCD)	
j. Struktur Organisasi Lembaga	
k. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
l. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
m. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
n. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
o. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lembaga	
p. Denah Lokasi diketahui oleh pemerintah setempat	
q. Analisis Dampak Lingkungan (ANDALIN)	
r. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
s. Foto Kegiatan Lembaga	
t. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar	
H. DINAS PERHUBUNGAN	
53. IZIN TRAYEK	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. File scan Asli KTP	
d. File scan Asli NPWP (Keterangan Status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. File scan Asli STNK	
f. File scan Asli Buku KEUR	
g. File scan Asli Jasa Raharja	
h. File scan Asli surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek	
i. Bukti kepemilikansarana (File scan Asli IMB dan File scan Asli Sertifikat Hak Milik)	
j. File scan Asli Surat Pernyataan	

kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan	
k. File scan Asli surat perjanjian antara anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi	
l. File scan Asli salinan SRUT (Untuk Kendaraan Baru)	
m. File Foto kendaraan yang akan diberi izin	
n. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
p. File scan Asli Rekomendasi BPJS Kesehatan	
q. File scan Asli Rekomendasi BPJS Ketenagakerjaan	
r. Untuk perpanjangan melampirkan File scan Asli Izin Trayek yang lama dan File scan Asli Buku Uji	
54. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN KAWASAN TERTENTU (TAKSI)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto copy Izin Usaha	
f. Foto copy surat tanda nomor kendaraan (STNK)	
g. Foto copy Pajak Kendaraan	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
k. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Foto copy buku uji berkala	
m. Foto copy BPKB Kendaraan	
n. Surat Pernyataan penyimpanan kendaraan (Pool)	
o. Memiliki Tempat pemeliharaan kendaraan (Bengkel)	
p. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
55. IZIN PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR	

DI LUAR RUANG MILIK JALAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
f. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
g. Foto Copy Izin Pemanfaatan ruang lahan lebih 1 (satu) hektar	
h. Foto Copy Keputusan Kelayakan lingkungan apabila luas lahan lebih dari 5000 m ²	
i. Foto Copy izin usaha	
j. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
k. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Foto copy Sertifikat Hak Milik	
m. Persyaratan kesanggupan mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan	
n. Pernyataan kesanggupan mengganti rugi kerusakan dan atau kehilangan kendaraan selama di parkir	
o. Pernyataan Kesediaan membayar pajak parkir	
p. Analisis dampak lingkungan (ANDALIN)	
q. Rekomendasi tim teknis dari Dinas Perhubungan kab. Mamuju.	
r. Pas Foto ukuran 3 x 4, 4 x 6 sebanyak 3 Lembar	
56. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
d. Surat kuasa apabila dikuasakan	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat domisili perusahaan dari instansi yang berwenang	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Memiliki tenaga ahli bidang ke tatalaksanaan	

(Ijazah , setifikat scan asli)	
1. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal	
Persyaratan teknis :	
a. Memiliki kapal Layar (KL)	
b. Memiliki kapal layar motor (KLM)	
c. Memiliki kapal Motor berbendera Indonesia dengan melampirkan bukti (scan asli):	
1. Grosse akta kapal	
2. Surat ukur kapal yang masih berlaku	
3. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku	
d. Crew list bagi tongkang bermesin	
m. Rekomendasi dari Dinas perhubungan Kab. Mamuju	
57. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
f. Sertifikasi pengawakan	
g. Persyaratan tertulis sanggup untuk memiliki 1 unit kapal penyeberangan berbendera Indonesia	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Personil yang memiliki keahlian dibidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)	
k. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
58. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Poto Copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
f. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
g. Akta pendirian perusahaan	
h. Surat – surat perkapalan	

i.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
59. IZIN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Foto Copy KTP Pemohon	
d.	Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
e.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
f.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
g.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
h.	Memiliki / mencantumkan Tenaga Ahli sesuai kompetensinya	
i.	Foto Copy Izin Lokasi	
j.	Foto Copy Izin Mendirian Bangunan	
k.	Foto Copy Izin Lingkungan	
l.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
60. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPAN		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Fotocopy KTP	
d.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e.	Desain Tekhnis	
f.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h.	Akte pendirian Perusahaan dari notaris dan perubahannya dengan pengesahan dari Menkumham untuk badan usaha, yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi / organisasi perusahaan. Sertifikat Hak milik	
i.	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk bangunan baru	
j.	Dokumen manajemen rekayasa lalu lintas untuk bangunan yang sudah terbangun	
k.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	

l. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
61. IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Desain Teknis	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Akte pendirian Perusahaan dari notaris dan perubahannya dengan pengesahan dari Menkumham untuk badan usaha, yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi / organisasi perusahaan	
i. Sertifikat Hak Milik	
j. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk bangunan baru	
k. Dokumen manajemen rekayasa lalu lintas untuk bangunan yang sudah terbangun	
l. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
62. IZIN USAHA PENGUMPUL LOKAL DI PELABUHAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Bukti kerjasama dengan penyelenggaraan pelabuhan	
d. Fotocopy KTP	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Akte pendirian Perusahaan dari notaris dan perubahannya dengan pengesahan dari Menkumham untuk badan usaha, yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi / organisasi perusahaan	
g. Fotocopy Izin Usaha	
h. Fotocopy IMB	
i. Fotocopy Sertifikat Hak Milik	

j.	Fotocopy Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
k.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
l.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
m.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
63. IZIN PENGEMBANGAN PELABUHAN UNTUK PENGUMPULAN LOKAL		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Fotocopy KTP	
d.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e.	Fotocopy Izin Usaha	
f.	Fotocopy Sertifikasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL)	
g.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i.	Rencana induk pelabuhan	
j.	Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dan petunjuk operasional, apabila dananya bersumber dari APBA/APBK	
k.	Perjanjian Konsensi dari penyelenggara pelabuhan apabila dananya bersumber dari badan usaha pelabuhan	
l.	Study kelayakan teknis: Hasil survey hidroceanografi skala 1 : 1000 dan tofografi , skala 1 : 1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidroceanografi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin dan gelombang dan; Lay out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun	
m.	Desain teknis yang memuat kondisi tanah	
n.	Kelayakan Ekonomi dan Fasilitas dan Finansial	
o.	Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	
p.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
q.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
r.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
64. IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN PENGUMPUL LOKAL		
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	

c. Fotocopy KTP	
d. Fotocopy izin pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Tersedianya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayaran	
g. Tersedianya fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Memiliki sistem pengelolaan lingkungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)	
k. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelabuhan	
l. Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat	
m. Berita uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal	
n. Surat pernyataan pertanggungjawaban penuh atas pengoperasian pelabuhan atas terminal yang bersangkutan	
o. Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan perundang undangan di bidang pelayaran dan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya	
p. Rekomendasi Dinas perhubungan Kab. Mamuju	
s. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
t. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
q. Kesiapan memfasilitasi Tim ke lapangan apabila dibutuhkan	
65. IZIN Pengerukan Perairan Pelabuhan	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Izin Usaha	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Fotocopy Izin Reklamasi Perairan Pelabuhan	
i. Keterangan penanggungjawab kegiatan	
j. Keterangan kegiatan pengerukan dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ sungaidan	

danau	
k. Lokasi dan koordinat geografis areal yang dikeruk	
u. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
v. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
m. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar	
66. IZIN REKLAMASI PERAIRAN PELABUHAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
f. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
g. Fotocopy Izin Usaha	
h. Fotocopy Izin Usaha Pengerukan	
i. Keterangan penanggungjawab kegiatan	
j. Keterangan kegiatan pengerukan dimaksudkan untuk kepentingan pembangunan dan atau pengembangan pelabuhan pengumpan lokal/ sungaidan danau	
k. Lokasi dan koordinat geografis areal yang dikeruk	
l. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang dikerjakan	
m. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk bangunan baru	
n. Dokumen manajemen rekayasa lalu lintas untuk bangunan yang sudah terbangun	
o. Dokumen AMDAL, UKL – UPL, SPPL	
p. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
w. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
x. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
q. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar	
67. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Fotocopy KTP	
d. Surat kuasa apabila dikuasakan	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	

f.	Memiliki penanggungjawab yang merupakan pemimpin tertinggi perusahaan atau sesuai ketentuan perundang undangan	
g.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i.	Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat domisili perusahaan dari instansi yang berwenang	
j.	Memiliki tenaga ahli bidang ke tatalaksanaan (Ijazah , setifikat scan asli)	
y.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
z.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k.	Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal	
	Persyaratan teknis :	
a.	Memiliki kapal Layar(KL)	
b.	Memiliki kapal layar motor (KLM)	
c.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Mamuju	
s.	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA & PETERNAKAN	
	68. IZIN USAHA PETERNAKAN	
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Fotocopy KTP	
d.	Fotocopy IMB	
e.	Fotocopy Izin Usaha	
f.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
g.	Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
h.	Denah dan Titik Lokasi Usaha	
i.	Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j.	Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k.	Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Mamuju	
l.	Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
m.	Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
p.	Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	
	69. IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN / TERNAK	
a.	Mengisi formulir permohonan	
b.	Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c.	Fotocopy KTP	
d.	Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi	

urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Izin Usaha	
f. Fotocopy IMB	
g. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
h. Surat Keterangan Izin Usaha pemotongan ternak dari Desa / Lurah Setempat yang diketahui Camat	
i. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Mamuju	
j. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
k. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
n. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Pasfoto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	
70. IZIN USAHA PERTANIAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Fotocopy Izin Usaha	
f. Fotocopy IMB	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
p. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
q. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
i. Pertimbangan Teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan, apabila areal yang dimohonkan berasal dari kawasan hutan	
j. Rencana Kerja Pembangunan Kebun termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun masyarakat	
k. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
a. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Mamuju	
71. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/ BIBIT TERNAK DAN PAKAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari	

OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto copy Izin Usaha	
f. Foto copy IMB	
g. Memiliki sarana prasarana laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan	
h. Memiliki sarana prasarana usaha produksi Benih / Bibit Ternak dan Pakan	
i. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI)	
j. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
k. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
r. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
s. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
l. Surat Keterangan Rencana Kabupaten / Kota (SKRK)	
m. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
n. Foto copy surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari dokter hewan	
o. Izin tenaga kerja asing berpengalaman bidang usaha peternakan	
p. Izin pemasangan instalasi peralatan	
q. Foto copy buku vaksin untuk pemasukan hewan kecil (anjing/kucing)	
r. Surat Keterangan Izin Usaha pemotongan ternak dari Desa / Lurah Setempat yang diketahui Camat	
s. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Mamuju	
72. IZIN USAHA PENGE CER (OBAT HEWAN)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV dan Badan Usaha Lainnya)	
f. Foto copy Izin Usaha	
g. Foto copy IMB	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
t. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
u. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	

a. Surat Keterangan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan dari Desa / Lurah Setempat yang diketahui Camat	
b. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Mamuju	
j. Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar	
K. DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	
73. IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto Copy Izin Usaha	
f. Foto Copy IMB	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Surat keterangan dari Desa/lurah setempat yang diketahui Camat	
l. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju	
74. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto Copy Pajak Reklame	
f. Foto Copy Surat Keterangan Usaha dari Desa / Lurah yang diketahui Camat	
g. Foto Copy IMB	
h. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
i. Surat Perjanjian kontrak / sewa tempat	
j. Surat Keterangan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Mamuju	
k. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Mamuju	
l. Rekomendasi BPJS Kesehatan	

m. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
m. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
n. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
n. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar	
L. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB MAMUJU	
75. IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy KTP	
d. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
e. Foto copy Izin Usaha	
f. Foto copy keputusan wilayah kerja pertambangan panas bumi	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL	
j. Fotocopy Izin Lokasi	
k. Pernyataan kesanggupan melakukan ketentuan CSR	
l. Pernyataan kesanggupan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal	
m. Pernyataan kesediaan memfasilitasi tim teknis kelapangan	
n. Pernyataan kesanggupan ketentuan peraturan perundang-undangan	
o. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
p. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
M. DINAS PERKEBUNAN	
76. IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus, dan bidang usaha perusahaan.	
d. Foto Copy KTP	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	

f. Fotocopy Izin Usaha	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kab. Mamuju	
j. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten / kota dari Gubernur	
k. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain	
l. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sesuai dengan Peruntukan IMB terhadap status pemanfaatan lahan
m. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah	
n. Izin Lingkungan	
q. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
r. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
o. Pernyataan Kesanggupan: <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) - Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran - Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan 	
p. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun kawasan dan masyarakat sekitar perkebunan.	
q. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas	
77. IZIN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	
a. Mengisi Formulir Permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus, dan bidang usaha perusahaan.	

d. Foto Copy KTP	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Foto Copy Izin Usaha	
g. Foto Copy IMB	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
j. Rekomendasikesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/ kota dari Gubernur	
k. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.	
l. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format dalam lampiran IV dan Lampiran XII Permentan 98/2013 ;	
m. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan	
n. Izin Lingkungan	
o. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format Lampiran XIII Permentan 98/2013.	
p. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sesuai dengan Peruntukan IMB terhadap status pemanfaatan lahan
q. Rekomendasi dari Dinas Perkebunan Kab. Mamuju	
s. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
t. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
78. IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG TERINTEGRASI ANTARA BUDIDAYA DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Profil perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus, dan bidang usaha perusahaan	
d. Foto Copy KTP	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	

f. Foto Copy Izin Usaha dan IMB	
g. Foto Copy Izin Lingkungan	
h. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sesuai dengan Peruntukan IMB terhadap status pemanfaatan lahan
i. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/ kota dari Gubernur	
j. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
k. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
l. Izin Lokasi yang dilengkapi dengan Peta digital calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain	
m. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas yang membidangi kehutanan, apabila area yang diminta berasal dari kawasan hutan.	
n. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran IV dan lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.	
o. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah	
p. Pernyataan kesanggupan ; Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) - Memiliki Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. - Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai pasal yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan - Melaksanakan kemitraan dengan pekebun, kawasan dan masyarakat sekitar perkebunan.	
t. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas	
u. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kab. Mamuju	
N. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
79. IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto copy Sertifikat / Sporadik	

d. Asli Surat Keterangan penguasaan lahan dari pemerintah setempat	
e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
f. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
g. Foto copy Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) / surat keterangan pelaku usaha perikanan dari pemerintah setempat Untuk Perorangan/Kelompok	
h. Foto copy Izin Usaha	
i. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju	
j. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
k. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
u. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
v. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
80. IZIN LOKASI	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy KTP	
d. Akta pendirian atau perubahan Badan Hukum bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan	
e. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
f. Peta/ sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohonkan	
g. Rencana kegiatan usaha (contoh terlampir)	
h. Surat Keterangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sesuai dengan Peruntukan IMB terhadap status pemanfaatan lahan
i. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
j. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
k. Surat Keterangan Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Barat (KPH Karama)	
l. Pertimbangan Teknis dari BPN	
m. Fotocopy bukti kepemilikan tanah / surat pernyataan tidak keberatan tanahnya dipakai usaha	
n. Fakta integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang di sampaikan ditandatangani oleh pimpinan / pemilik perusahaan di atas materai Rp.6.000	
o. Analisis Dampak Lingkungan (ANDALIN)	
w. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
x. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	

81. REKOMENDASI KELAYAKAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Foto Copy Sertifikat Hak Milik	
d. Surat Keterangan penguasaan lahan	
e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
f. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
g. Foto Copy Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) / surat keterangan pelaku usaha perikanan dari pemerintah setempat Untuk Perorangan/Kelompok	
h. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
i. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
y. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
z. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
j. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju	
82. REKOMENDASI KELAYAKAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS	
c. Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju	
d. Foto Copy surat ukuran dalam negeri sementara	
e. Foto Copy pas besar sementara	
f. Foto Copy Izin Usaha	
g. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
h. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
i. Foto Copy KTP yang masih berlaku	
j. Foto Copy Surat Keterangan Kecakapan	
k. Foto Copy Surat Persetujuan Berlayar	
l. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
m. Foto Copy Sertifikat keahlian dan pengawasan kapal penangkapan ikan	
n. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
o. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
O. DINAS SOSIAL	
83. IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Fotocopy KTP Pengurus	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak) Organisasi	
d. Anggaran Dasar Rumah Tangga	

e. Akta Pendirian / Perubahan dari Notaris.	
f. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
g. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
h. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Mamuju.	
i. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir yang telah divalidasi di Bapenda Kabupaten Mamuju	
j. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	
k. Rekomendasi Tim Teknis dari Dinas Sosial Kabupaten Mamuju	
l. Proposal	
P. DINAS PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	
84. IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP YANG DISIMPAN DI LEMBAGA KEARSIPAN	
a. Mengisi formulir permohonan	
b. Foto Copy KTP Pemohon	
c. Foto Copy NPWP (keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak)	
d. Rekomendasi BPJS Kesehatan	
e. Rekomendasi BPJS Ketenaga Kerjaan	
f. Surat persetujuan dari instansi yang berwenang/Rekomendasi dari Instansi Teknis	
g. Bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir	
h. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan	

BUPATI MAMUJU

H. HABSI WAHID